



PUSAT PEMBERITAAN (INFORMATION CENTRE) ANGKATAN BERSENJATA

INFO UNTUK PARA PENDBABAT/PETUGAS;/PERTAHANAN/KEAMANAN, KARYAWAN
ANGKATAN BERSENJATA DAN MASJARAKAT UMUM JANG BERKEPENTINGAN.

MENPEN NO. 0524/PEN/SK/DIRDIEN/PPC/1966

DIREKTORAT UMUM/HANKAM

Alamat Redaksi : Medan Merdeka Barat 13 Djakarta.

Telp. Redaksi/Tata Usaha : OG 46743

DJAKARTA, SENIN, 13 MARET 1967

INTISARI BERITA

NO: 541/TH. II/67

EDISI PAGI :
I. U M U M :

1 - 1	NASKAH PELAKSANAAN KEAMANAN "ILAJAH".....	hal 1
	PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DITANDATANGANI.....	hal 1
1 - 2	PERDJUDIAN MEMPERHEBAT DIPINGGIR DJALAN.....	hal 4
	IBUKOTA	hal 4
1 - 3	PRESIDEN SUKARNO DILARANG MELAKUKAN	hal 9
	KEGIATAN POLITIK SAMPAI PEMILU.....	hal 9
1 - 4	GEMBONG GESTAPU/YKI SJAM DAN 5 ORANG.....	hal 17
	TEMANNJA DITJIDUK ABRI.....	hal 17
1 - 5	SIDANG ISTIMEWA MPRS BERACHIR DENGAN	hal 18
	KETETAPAN MENTJABUT KEKUASAAN PIMPINAN.....	hal 18
	NEGARA SUKARNO.....	hal 18
1 - 6	Pangdam VI/Siliwangi Majidien Dharsono : TAK ADA JANG MERASA MENANG ATAU KALAH TAPI.....	hal 21
	SBLURUH RAFJATLAH JANG MERASA MENANG.....	hal 21
EKU INBANG :		
2 - 1	BANTUAN EKONOMI AUSTRALIA PADA INDONESIA.....	hal 1
	SEDANG DIBITJATAKAN DI MELBOURNE.....	hal 1
LUAR NEGERI :		
3 - 1	DJAW. RAHASIA AS PUNJA HUBUNGANDENGAN	hal 3
	ORG. MAHASISWA BELANDA?.....	hal 3
3 - 2	INGGRIS, SELANDIABARU, DAN AUSTRALIA MAU.....	hal 4
	PERTAHANKAN ASIA TENGGARA DARI ANTJAMAN RRT... ..	hal 4
3 - 3	PELATIHAN TIBET PA'AI DI NEW DELHI.....	hal 4
	MENENTANG TJINA.....	hal 4
3 - 4	SIDANG ISTIMEWA PBB 21 APRIL JAD.....	hal 5
3 - 5	PRESIDEN JOHNSON AKAN KUNDJUNGI DAERAH?.....	hal 7
	PASIFIC.....	hal 7

Dan lain-lain.

----- (w) -----

PERPUSTAKAAN NASIONAL
MUSEUM PUSAT DEPT. P. D. & K.



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13 - 3 - '67

Sementara itu dikatakan pula oleh Djenderal Suharto, bahwa dalam melaksanakan segala keputusan2 MPRS ini yang penting bagi kita ialah harus memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, jangan sampai terpetjah belah, sebab kalau kita terpetjah belah, akan mencuntungkan sisa2 Gestapu/PKI dalam melakukan gerpolnja.

Diingatkan pula oleh Djenderal Suharto agar segenap Rakjat Indonesia tetap memelihara kewaspadaan nasional, dan bersihkan lah dari lingkungan kita segala prasangka, kesalah pahaman, tjuriga mentjura rigai yang belakangan ini ditiup2kan oleh gerpol PKI. Karena, menurut Pak Harto, sampai sekarang ini terbukti PKI masih melakukan kegiatan2 gelapnja.

Selanjutnja diingatkan pula oleh Pd Presiden agar kita menghindarkan konflik baru sesama Orde Baru, sebab hal ini akan mengakibatkan perpetjahan dikalangan kita.

Pemilu harus mengutamakan kesatuan dan persatuan Bangsa.

Berbitjara tentang pemilihan umum yang akan datang Pd Presiden Djenderal Suharto memperingatkan agar pemilihan umum jad itu benar2 didjadikan landasan untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia, membina persatuan dan ke satuan Bangsa.

Pemilihan Umum, menurut Djenderal Suharto, bukanlah sekedar mengumpulkan suara rakjat, tetapi adalah untuk membawa suara rakjat itu mengatur rumah tangga negara dan bangsa Indonesia tahap demi tahap ke arah kemakmuran, dan mampu melaksanakan kemurnian UUD 45.

Pemilihan Umum harus mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa, demikian Djenderal Suharto yang selanjutnja menjatakan bahwa hanya dengan kesatuan dan persatuan itulah segalanja bisa berhasil seperti pada sidang istimewa MPRS ini. Demikian al. amanat penutupan Djenderal Suharto selaku Pd Presiden pada upatjara penutupan Sidang Istimewa MPRS Minggu malam.

Perlu ditambahkan bahwa, pada upatjara tsb selain melantik dan menjumpah Djenderal Suharto sebagai Pd Presiden yang penjumpahannya dilakukan oleh Ketua MPRS Djenderal NASUTION djuga telah dibatjaka keputusan2 MPRS Oleh Sekretaris Umum MPRS Lot. Kol Abdul Kadir Besar SH yang kemudian dilandjutkan dengan penjerahan berkas2 hasil keputusan2 MPRS oleh Pimpinan MPRS pada Djenderal Suharto.

(R.011/PAB-03/III/67).



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13 - 3 - '67

Pidato Penutupan Ketua MPRS Djenderal
Nasution :

DENGAN SELESAINJA S.I. MPRS BERACHIRLAH SITUASI
KONFLIK DAN BERACHIR PULA KERDASAAN BUNG KARNO.

¶ S.I. MPRS sangat penting bagi perkembangan sedjarah Bangsa dan Negara Indonesia.

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Ketua MPRS Djenderal Nasution dalam amanatnja pada penutupan Sidang Istimewa MPRS Minggu malam kemarin menjatakan bahwa Sidang Istimewa MPRS ini sangat penting bagi perkembangan sejarah bangsa dan negara Indonesia bagi tegaknja UUD 45 dan merupakan batu udjian yang maha berat bagi tegaknja keadilan dan kebenaran.

Oleh Djenderal Nasution dijatakan pula bahwa sebelum pembukaan Sidang Istimewa MPRS ini suasananja sudah nampak gawat karena ada dua persoalan yang mempunjai pandangan yang berbeda untuk mengachiri konflik situasi.

Walaupun diantara peserta rapat baik ABRI ataupun ormas² dan anggota lainnja terdapat perbedaan perbedaan, tetapi kita mempunjai tudjuan yang sama yakni menjelamatkan negara dan bangsa, sehingga harapan orde lama untuk mengatjau dengan siasat adu domba dan fitnah gagal. Terutama kepada mereka yang akan mengadu domba antar ABRI, karena walaupun bagaimana ABRI tak akan mundur setapakpun dan sikap ABRI tak akangojah sesuai dengan Sapta Marga yang ditjetuskan dengan statement² beberapa waktu yang lalu.

Dualisme dapat diachiri

Lebih landjut Djenderal Nasution menjatakan bahwa rapat² komisi yang diadakan siang dan malam - tanpa mengenal lelah sesuai dengan kepribadian kita tak sia sia dengan mempertahankan resolusi dan memorandum DPRGR dan estimate tentang kondisi dan situasi dapat dihasilkan oleh Sidang.

Oleh Djenderal Nasution ditegaskan pula bahwa dengan ketetapan yang telah dihasilkan oleh Sidang Umum MPRS tersebut maka dualisme baik formil maupun materiel dapat diachiri dan dengan ini tanggung djawab pemerintahan negara ada ditangan Djenderal Suharto. ABRI sebagai pengawal dan mengamal Pan tjasila yang sedjak tahun 45 berdjuaug membina UUD 45 dan setiap penjelwengan yang dilakukan, oleh ABRI telah dapat dilatasi oleh ABRI sendiri. Djenderal Nasution menjatakan bahwa Sidang Istimewa MPRS ini merupakan tonggak sedjarah untuk menegakkan hukum dan konstitusi, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Achirnja Djenderal Nasution mrngharapkan kepada seluruh kekuatan Orde Baru untuk lebih waspada menghadapi gerpol PKI/Gestapu yang hendak menggagalkan pelaksanaan Kabinet Ampera. Demikianlah amanat penutupan ketua MPRS Djenderal Nasution. (R.032/A-05/PAB/III/67).



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

M.SKAH PELAKSANAAN KEAMANAN WILAJAH
PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA DI
TANDA TINGGI

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Panglima Kolaga Letdjen Umar Wirahadikusumah dalam amanatnya pada upacara perndatangan naskah pelaksanaan keamanan diwilajah perbatasan Indonesia - Malaysia Sabtu kemarin bertempat di AB Kolaga Djl. Merdeka Selatan Djakarta mengharapkan agar pengesahan dari naskah tsb dapat dimanfaatkan oleh kedua pemerintah seluas mungkin, sebagai langkah - landjutan menuju normalisasi hubungan antara kedua negara, demi kepentingan keluarga besar rumpun Melayu dalam rangka Maphilindo.

Upatjara penanda tangannya naskah Pelaksanaan Keamanan diwilajah perbatasan antara RI dan Malaysia atau yang disebut Security Arrangements on the Border Regions itu dihadiri oleh Badan Perhubungan Malaysia di Djakarta Letkol Wan Ismail, Wapang Kolaga Laksda (L) O.B. Sjaaf, para perwira tinggi dan menengah di lingkungan Kolaga.

Seperti diketahui pada tanggal 9 Maret 1967 jl. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan Malaysia Tan Sri Abdul Kadir bin Sjamsudin telah menandatangani naskah tsb di Kualalumpur yang disaksikan oleh Perwira Penghubung RI di Malaysia Kol.Beni Murdani.

Dinjatakan oleh Panglima Kolaga Letdjen Umar Wirahadikusumah bahwa dalam rangka Security Arrangements On The Border Regions, Kolaga telah mengeluarkan instruksi penghentian semua operasi fistek dan penarikan unsur2 tempur dari perbatasan kembali keinduknja semula. Djuga telah diadakan penempatan team liaison/penghubung Pemerintah RI di Kualalumpur, Kutjing dan Tawao sedang dari pihak Malaysia telah ditempatkan di Djakarta, Bengkajang, (Kalbar) dan Tarakan - (Kaltim).

Untuk lebih mempererat hubungan kedua pemerintah telah diadakan kunjungan misi muhibah setjara timbal balik.

Dalam rangka record of understanding on non military matters dalam pengertian2 bersana yang telah dirintis oleh Kolaga, selandjutnja akan diselesaikan oleh Departemen2 yang bersangkutan, dengan koordinasi Koti, yakni mengenai imigrasi, hubungan udara/laut, telekomunikasi, penerangan, pendidikan/kebudayaan dll.

Demikian Panglima Kolaga Letdjen Umar Wirahadikusumah yang dengan pandjang lebar telah mendjelaskan tentang keadaan sedjak adanya konfrontasi hingga tertjapainja persetujuan pelaksanaan keamanan diwilajah Perbatasan RI dan Malaysia yang telah ditandatangani itu.

(R.034/A-7/PAB/III/67).



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13 - 3 - '67

PRESIDIUM GMNI "BARU", TERBENTUK

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Presidium Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dalam deklarasi nya jng ditandatangani oleh ketua umum Heru Baskoro dan sekdjennja Binthas S.P. menyatakan tidak mengakui lagi Presidium GMNI jang dipimpin oleh Drs Surjadi.

Sebagai alasan dikemukakan bahwa Presidium GMNI pimpinan Surjadi tidak tegas memperjuangkan Orde Baru, dan tidak melaksanakan dengan konsekwen keputusan2 Kongres persatuan dan kesatuan PNI/FM di Bandung chususnja mengenai pembersihan tubuh GMNI dari unsur2 ASU.

Pengurus jang lama itu lebih menundukkan garis perjuangan Orde Lama dengan membebek kepada unsur2 DPP PNI jang masih mengikuti garis perjuangan Sukarno jang terang2 telah mengindjak2 Pantjasila dan UUD 45.

Presidium GMNI jang baru

Berdasarkan alasan2 tersebut maka baru2 ini telah dibentuk Presidium GMNI sementara dengan susunan sbb : ketua umum Heru Baskoro, ketua2 I sampai IV masing2 A. Sjukry Suaidy, Popo S Harun, Anton Sutedjo, dan Sofjan Rasjid, sekdjenn dan wakil2nja Sekdjenn Binthas S.P., Boy Surjawikarta, dan Miries Sudajat, Bendahara Sumnto, dan anggota2 S.A. Pangarang, Suparno Permedi, dan Djodi Sukarno.
(R.048/II/PAB/III/67).

P E N G U M U M A N PNI/FM

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Kepada seluruh anggota kelompok PNI/FM dalam MPRS, diumumkan bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Maret 1967 jam 09.00 pagi, akan diadakan pertemuan (briefing) dengan pihak DPP - PNI. Diruang komisi B DPR GR Senajan.

Demikian anggota MPRS H. Wachju Mh. Enoch atas nama pimpinan PNI/FM minta mengumumkan.

(R.050/Rel/PAB/III/67).



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13 - 3 - '67

KAMI/KAPPI PERINGATI SETAHUN
LAHIRNJA SP 11 MARET

Djakarta, 13 Maret (PAB).

KAMI/KAPPI Djakarta Raya dan dari berbagai bagian daerah diseluruh Indonesia dengan djumlah jang agak besar Sabtu kemarin bertempat di halaman Universitas Indonesia Djl. Salemba Djakarta, telah mengadakan apel memperingati satu tahun lahirnja SP 11 Maret dan mensukseskan Sidang Istimewa MPRS jang sedang berlangsung di Senajan Djakarta.

Sebelum apel tersebut berlangsung diberbagai tempat strategis di Djakarta diadakan penjagaan jang ketat oleh kesatuan2 ABRI dan perhatian para petugas keamanan itu tertuju kepada Mahasiswa dan peladjar, jang mungkin para petugas keamanan itu telah mendapat info bahwa mahasiswa dan peladjar akan berdemonstrasi. / telah

Dengan kemauan jang sangat keras para mahasiswa dan peladjar akhirnya dapat djuga berkumpul di halaman UI Salemba dengan djalan keluar masuk gang hingga sampai di UI.

Dalam sambutannya Fahmi Idris dari KAMI Djaya menyatakan bahwa para mahasiswa dan peladjar sebenarnya dilarang berkumpul lebih dari lima orang dan para mahasiswa dan peladjar telah mendapat rintangan agar djangan bisa berkumpul di UI, tapi halangan apapun jang dihadapi selama RI masih berdemonstrasi, maka para mahasiswa dan peladjar harus dapat melaksanakan hak2 demokrasi.

Dinyatakan bahwa dalam pembinaan Orde Baru menegakkan kebermandan keadilan serta keluarnya SP 11 Maret, mahasiswa dan peladjar mempunyai peranan jang penting, dan apabila Sidang Istimewa MPRS jang sedang berlangsung itu tidak menjuarakan suara hati nurani rakjat, maka KAMI/KAPPI akan kembali memasuki djalan2 raja memperdjuaan gkan tuntutan hati nurani rakjat.

Sehubungan dengan itu Nai nggolan djuga dari KAMI Djaya menjerukan kepada seluruh anggota KAMI/KAPPI untuk tetap berada diposnja masing2 guna menunggu komando dari pimpinan KAMI/KAPPI.

(R.34/A-7/PAB/III/67).





PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13-3-1967.

PERDJUDIAN MENGELEBAT DIPINGGIR
DJALAN IBUKOTA

+ Dibantu oleh anggota ABRI
tertentu.

Djakarta, 13 Maret (PAB).-

Pada akhir2 ini di Ibukota Djakarta Raya, terlihat semakin meningkatnja perjudian, terutama djudi ketjil2an jang senantiasa diadakan dipinggir2 djalan Ibukota. Dalam hal ini PAB mendapat keterangan bahwa djudi ketjil2an tsb sering diadakan dipinggir djalan Salemba raya, depan Gang Kenari, dan ditempat2 lainnja jang selalu ramai dikundjungi orang, seperti tempat perhentian bus/bemo. Sementara itu djuga setiap perjudian jang diadakan itu dibantu oleh oknum2 anggota ABRI, jang terlibat dimana dilangsungkan perjudian itu, senantiasa ada nongkrong anggota2 ABRI tertentu, jang bertugas sebagai "alat" oknum jang menjelenggarakan perjudian tsb.

+ Djenis2 perjudian dan ke-
tjurangannja.

Mengenai djenis2 perjudian jang diadakan disepanjang djalan itu, menurut keterangan2 jang dikumpulkan PAB, antara lain permainan rolet, lotre rokok dll. jang kegiatannja semata2 menipu masyarakat, serta memberikan keuntungan setjara tidak halal kepada penyelenggara.

Dalam bubungan ini, pihak penyelenggara jg dibantu oleh "alatnja" jang ampuh itu (anggota ABRI), selalu dengan setengah paksa mengambil uang tarohan pemain, dan setidaknya dengan tjara2 jang tjukup tjurang tob uang tarohan tsb diambil alibnja, dimana pihak pemain jang tidak berdjaja menghadapi tukang pu kulnja, terpaksa menjerah.

Untuk mengatasi soal tsb. satu2nja djalan, agar djangan sampai terlalu banyak masyarakat kena penipuan sematjam itu, ialah turun tangannja petugas ABRI membasmi perjudian didjalanan itu.

(R.35/PAB-08/III/67).-

---- S1 ----





PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

- 5 -

13-3-1967.-

CHAS KOTA MEDAN MENULAR KE
DJAKARTA

Djakarta, 13 Maret (PAB).-

Suatu hal jang tidak dapat dibantah lagi serta sekarang semakin meningkat ialah, bahwa chas kota Medan jang telah menular ke Ibukota Djakarta. Sekarang terlihat semakin meningkatnja pendjuanlan rokok2 luar negeri setjara bebas di Djakarta, dimana hal tsb. pada mulanja banja terdapat dikota Dolar Medan.

Berbitjara mengenai segi2 kebaikannja, dapatlah dikemukakan bahwa praktek seperti itu benar2 memperlihatkan usaha2 membadjiri pasaran dengan kebutahan masjarakat, dalam rangka menekan barga. Demikian menurut PAB.

(R.35/PAB-08/III/67).-

----- S1 -----

GUBERNUR2 MULAI SIDANG DENGAN MENTERI
DALAM NEGERI HARI INI

Djakarta, 13 Maret (PAB).-

Pagi ini (Senin) djam 09.00 WIB di Merdeka Selatan 6. Djakarta akan berlangsung Pembukaan Pertemuan Kerdja Menteri Dalam Negeri dengan para Gubernur Kepala Daerah Se Indonesia, Pada pembukaan pertemuan kerdja tsb. Menutama Djendral TNI Soeharto dan Menutama/Menlu Adam Malik akan memberikan amanat nja.

Sehubungan dengan tsb. diatas bertempat di Gedung Wanita, Djakarta hari Selasa 14 Maret 1967 akan berlangsung Pembukaan Konggres Pertiwi dimana akan memberikan sambutannja Gubernur KDCI-Djaya Majdjen KKO Ali Sadikin, Ibu Soeharto dan Mendagri Letdjen Basuki Rachmat.

(R039/A-14/PAB/III/67).-

----- S1 -----





PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13-3-1967.-

MANIPOL/USDEK DITINDJAU KEMBALI

Djakarta, 13 Maret (PAB).-

Dalam ketetapanja no.XXXIV/MPRS/67, Pimpinan MPRS telah memutuskan bahwa, Ketetapan tentang peninjauan kembali MPRS No.I/MPRS/60, tentang Manifesto Politik (Manipol) sebagai garis2 haluan negara, kini tidak sesuai lagi dengan kondisi2 negara dan situasi sekarang. Karena Manipol kini agar ditinjau kembali. Untuk djelasnja, PAB maatkan ketetapan MPRS tsb sbb.:

R A N T J A N G A N
K E T E T A P A N
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
NO.XXXIV/MPRS/1967
tentang

PENINDJAUAN KEMBALI KETETAPAN MPRS NO.I/MPRS/1960
TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBA
GAI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang2 Dasar 1945 serta untuk mendjamin berlakunja hukum dan demokrasi di bumi Indonesia maka Ketetapan MPRS No.I/MPRS/1960 jang telah menetapkan Garis2 Besar Haluan Negara, perlu ditinjau, di rubah dan diganti sesuai dengan tuntutan dan perkembangan politik, ekonomi dan sosial pada saat sekarang ini;

b. bahwa berdasarkan ketetapan MPRS No.X/MPRS/1966 pasal 1, Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara berkedudukan dan berfungsi seperti Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang dimaksud dalam Undang2 Dasar 1945, serta berwenang untuk menetapkan Garis2 Besar Haluan Negara.

Mengingat : 1. Undang2 Dasar 1945 pasal 3;
2. Ketetapan2 MPRS No.I/MPRS/1960 dan No.II/MPRS/1960;
3. Ketetapan MPRS No.X/MPRS/1966 pasal 1;
4. ketetapan2 MPRS No.XII/MPRS/1966, No.XXII/MPRS/1966, No.XXIII/MPRS/1966, No.XXIV/MPRS/1966, No.XXVII/MPRS/1966, No.XXVIII/MPRS/1966, No.XXXII/MPRS/1966;

Mendengar.....



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13-3-1967.

Mendengar : Musjawarat dalam Sidang Istimewa Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jg. berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PENINDJAUAN KEMBALI KE TETAPAN MPRS NO. I/MPRS/1960, TENTANG MENI FESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.

Pasal 1.

Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi sekarang.

Pasal 2.

Kepada Pimpinan dan badan Pekerdja MPRS ditugaskan untuk menindjau kembali, meneliti dan mengganti Ke tetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tersebut pada pasal 1, sesuai dengan hasil-hasil Sidang Umum ke IV dan Sidang Istimewa Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 3.

Hasil-hasil Karya Pimpinan dan Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara yang dimaksud dalam pasal 2 dibawa kesidang Umum MPRS/MPR untuk disahkan.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 12 Maret 1967.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Dr. A. H. NASUTION
DJENDRAL TNI.-

Wakil Ketua,

OSA MALIKI

Wakil Ketua,

M. SIREGAR

Wakil Ketua,

H. M. SUBCHAN, S. E.

Wakil Ketua,

M A S H U D I
MAJ DJEN TNI.-

----- S1 -----



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13-3-1967

P E N D J E L A S A N

- I. Menurut Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 pasal 3, maka mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam 5 tahun, Madjelis memperhatikan segala jang terdjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa jang hendaknja dipakai untuk dikemudian hari.
- II. Mengingat perkembangan masyarakat kita achir-a-achir ini baik dalam bidang politik, ketata-negaraan, ekonomi, sosial dan kebudajaan, maka Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi masyarakat dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali, diteliti dan diganti.
- III. Selama belum ada Ketetapan baru dari Sidang Umum MPRS/MPR mengenai Haluan Negara, maka bagian-bagian dari Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara jang tidak bertentangan dengan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan MPRS dalam Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967 tetap dipergunakan sebagai Pedoman.

----- S1 -----





U M U M :

13 -3- ' 67

PRESIDEN SUKARNO DILARANG MELAKUKAN
KEGIATAN POLITIK SAMPAI PEMILU

* Kekuasaannya sebagai Pimpin
Negara ditjabat.

Djakarta, 13 Maret (PAB)

Dalam ketetapanja No. XXXIII/MPRS/1967, Pimpin
MPRS telah mengeluarkan keputusan untuk menjab
but kekuasaan Pemerintahan dari tangan Presiden Sukar
no. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tgl. 12 Maret
Minggu siang kemarin jang antara lain telah memutuskan
pula melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan pol
itik sampai Pemilihan Umum dan sedjak berlakunya ketet
apan ini menarik kembali mandat MPRS dari Presiden
Sukarno serta segala kekuasaannya Pemerintahan Negara
jang diatur dalam UUD'45.

Untuk lengkapnja, maka dengan ini PAB memuat
kan ketetapan MPRS tsb sbb.:

R A N T J A N G A N
K E T E T A P A N

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

No.:XXXIII/MPRS/67.

tentang

PENTJABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI
PRESIDEN SUKARNO.

DENGAN RACHMAT TOHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa keseluruhan Pidato Presiden/Man
dataris MPRS jang disampaikan kepada
MPRS pada tgl. 22 Djuni 1966 jang ber
djudul "Nawaksara" dan Surat Presiden
Mandataris MPRS ttgl. 10 Djanuari No. 01/
Pres/1967 tentang Pelengkap Nawaksara,
tidak memenuhi harapan rakjat pada umum
nja, anggota2 MPRS pada chususnya, karena
tidak memuat setjara djelas pertanggung
an-djawab tentang Kebidjaksanaan Presi
siden mengenai pembontakan kontra Revo
lusi G 30 S/PLI beserta epiloojnja, kemun
dunan ekonomi dan kemerosotan achlak.

ba.....





U M U M :

13 -3- ' 67

- b. bahwa Presiden /Mandataris MPRS telah menjerahkan kekuasaan Pemerintahan Negara kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti yang dijuntkannya dalam Pengumuman Presiden /Mandataris MPRS tgl. 20 Pebruari '67.
- c. bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban / Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam suratnya No. R-032/'67 tgl. 1 Pebruari 1967 yang dilengkapi dengan pidato laporannya dihadapan Sidang Istimewa MPRS pada tgl. 7 Maret 1967, MPRS berperdapat, bahwa ada petunjuk, yang Presiden Sukarno telah melakukan kebijaksanaan yang setjara tidak langsung menuntungkan G 30/S/PKI dan melindungi tokoh2 G 30 S/PKI ;

- Memperhatikan :
- 1. Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong rojong, tgl. 9 dan 23 Pebruari 1967 ;
 - 2. Pidato Ketua MPRS pada pembukaan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 ;
 - 3. Pidato sambutan Ketua DPR GR pada pembukaan Sidang Istimewa MPRS ;
 - 4. Keterangan Pemerintah didepan Sidang DPR GR pada tgl. 4 Maret 1967 ;
 - 5. Pidato laporan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dihadapan Sidang Istimewa MPRS pada tgl. 7 Maret 1967.

- Mengingat :
- 1. Pembukaan UUD'45, UUD'45 beserta Penjelasannya ;
 - 2. Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/ 1967 tentang Penolakan Pidato Pelengkap Nawaksara.
- Mendengar :
- Musjawarah Sidang MPRS tgl. 7 Maret sampai dengan tgl. 12 Maret 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PEJTJABUTAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DARI PRESIDEN SUKARNO.

B A B I

Pasal 1.

Menjatakan, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban konstitusional, sebagaimana lajaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusjawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang2 Dasar 1945.

Pasal. 2.....



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13 43- 1 67

Pasal 2

Menjatakan , bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara) sebagai jang memberikan mandat, jang diatur dalam UUD '45.

Pasal 3

Melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilu dan sedjak berlakunja ketetapan ini menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno serta segala kekuasaan Pemerintahan Negara jang diatur dalam UUD '45.

Pasal 4

Menetapkan berlakunja ketetapan MPRS No. XV/MPRS /1966 , dan mengangkat Djendral Suharto , Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/ 1966 sebagai Pedjabat Presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnja Presiden oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat hasil Pemilihan Umum, sebagaimana lajaknja kewadajiban seorang Mandataris thd MPRS

Pasal 5.

Pedjabat Presiden tunduk dan bertanggung djawab kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara).

B A B II.

Pasal 6

Menetapkan penyelesaian persoalan hukum selandjutnja jang menjangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan2 hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, dan menjerahkan pelaksanaannja kepada Pedjabat Presiden.

B A B. III

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai dajalaku surut mulai pada tgl. 22 Pebruari 1967.

Ditetapkan : di Djakarta.

Pada tgl. : 12 Maret '67

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Dr. A. H. NASUTION.

DJENDRAL TNI

Wakil Ketua,

H. M. SUBCHAN Z. E.

Wakil Ketua,

M A S H U D I

MAJ DJEN T. N. I.

Wakil Ketua,

OSA MALIKI.

Wakil Ketua

M. SIREGAR

MEMORI PENDJELABAN

Pengertian kekuasaan Pemerintahan Negara jang di maksud kan disini, adalah seperti jang dimaksudkan dalam Undang2 Dasar 1945 beserta Pendjelasannja, sehingga sesuai dengan ketentuan itu maka Presiden Sukarno dengan ini diganti oleh Djendral Suharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/66, selaku Pedjabat Presiden Republik Indonesia.

(R050/PAB-03/III/67).

----- (w) -----

U M U M :

13 - 3 - '67

ADJARAN2 PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
BUNG KARNO DITJABUT

Djakarta, 13 Maret (P.A.B).

Sidang istimewa MPRS yang berlangsung sejak tanggal 7 Maret dan berakhir pada tanggal 12 Maret kemarin, selain menetapkan mentjabut kekuasaan Presiden/Mandataris MPRS Sukarno juga telah mentjabut adjaran2 Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang tertentang dalam ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966.

Pentjabutan adjaran2 Bung Karno tsb dimaksudkan dalam ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 yang bunji lengkapnja sebagai berikut :

R A N T J A N G A N
K E T E T A P A N

MADJELIS PERUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

No. : XXXVI/MPRS/1967

tentang

PENTJABUTAN KETETAPAN MPRS No. XXVI/MPRS/1966

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MADJELIS PERUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA, REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang, : a. bahwa karya karya Bung Karno yang di kenal sebagai adjaran adjaran Pemimpin Besar Revolusi sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketetapan MPRS No XXVI/MPRS/1966, mempunjai kedudukan yang sama dengan karya karya Pemimpin pemimpin Indonesia lainnja, dalam tata susunan kehidupan demokrasi serta kehidupan ketata negaraan menurut undang undang dasar 1945 yang berdasarkan Pantjasila :

b. bahwa berhubung dengan itu perlu mentjabut ketetapan MPRS yang mengatur tentang penelitian adjaran adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Mengingat, : Undang undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (3).

Mendengar, Musjawarah Sidang Istimewa Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PENTJABUTAN KETETAPAN MPRS NO. : XXVI/MPRS/1966.

Pasal 1 ...



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13 - 3 - 67

Pasal 1

Mentjabut ketetapan Madjelis Per
musjawaratan Rakjat Sementara No.XXVI/MPRS/1966.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di :Djakarta.
Pada tanggal :12 Maret 1967

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SELENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua ,

Dr. A.H. NASUTION
DJENDRAL TNI

Wakil Ketua,

SA. MALIKI

Wakil Ketua,

M. SIREGAR

Wakil Ketua,

H.M.SUBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,

MASHUDI
MAJIDJEN TNI.

PENGUKUHAN KEPUTUSAN MPRS TENTANG
PERPANDJANGAN WAKTU PANITYA AD HOCK B

Djakarta, 13 (PAB)).

Dalam surat keputusannya No.7 /MPRS/1967,
MPRS kemarin siang telah memutuskan pengukuhan ke
putusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 No.24/B/
1967 diktum ketiga tentang Perpandjangan waktu ker
dja Panitya Ad Hock B selama 6 bulan mulai tanggal
ditetapkannya, ketetapan ini jaitu tanggal 12 Maret
1967.

Untuk djelasnja Keputusan MPRS No. 7/MPRS/
67 tersebut kani muatkan selengkapnja sebagai berikut :

RANTJANGAN...



U M U M :

13 - 3 - '67

R A N T J A N G A N
K E P U T U S A N

MADJELIS PERUSAJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

No. : 7 / MPRS / 1967

tentang,

PENGUKUHAN KEPUTUSAN PIMPINAN MPRS TANGGAL 6 MARET
1967 No. 24 / B / 1967 DIKTUM KETIGA, TENTANG PERPAN-
DJANGAN WAKTU KERJA PANITIA AD HOC B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MADJELIS PERUSAJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan keputusan pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 No. 24 / B / 1967 telah ditetapkan tentang diterimanya dengan baik hasil karya Panitia Ad Hoc II, III dan IV sebagai bahan pokok untuk disebar luaskan guna penjemputan lebih lanjut,

b. bahwa penjebar luasan bahan pokok tersebut dilakukan oleh Sekretariat Madjelis Perusajawaratan Rakjat Sementara ;

c. bahwa batas waktu penyelesaian tugas panitia panitia MPRS menurut pasal 3 ketetapan MPRS No. XIV / MPRS / 1966 ditetapkan selama 3 bulan ;

d. bahwa dianggap perlu untuk mengukuhkan keputusan yang dimaksud pada a dan b diatas, guna memberikan keleluasaan kepada panitia Ad Hoc B untuk menyelesaikan keseluruhan tugas kewajibannya yang masih harus disempurnakan dan diwujudkan.

Mengingat, 1. Undang undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2)
2. Ketetapan MPRS No. XIV / MPRS / 1966
3. Keputusan Pimpinan MPRS No. 43 / 1 / 25 / MPRS / 1966
4. Keputusan pimpinan MPRS No. 24 / B / 1967

Mendengar : Musjawarah sidang istimewa Madjelis Perusajawaratan Rakjat Sementara dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 Maret 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan keputusan pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 No. 24 / B / 1967 diktum ketiga, tentang perpanjangan waktu kerja panitia Ad Hoc B selama 6 bulan mulai tanggal ditetapkannya penetapan ini.

KEDUA...



U M U M :

13 - 3 - '67

KEDUA : Djumlah anggota panitia Ad Hoc B tersebut dapat ditambah dan disempurnakan.

KETIGA : ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 12 Maret 1967

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Dr. A.H. NASUTION
DJEN DERAH TNI.

Wakil Ketua,

OSA MALIKI

Wakil Ketua,

M. SIREGAR

Wakil Ketua,

H.M SUBCHAN Z, E,

Wakil Ketua,

M A S H U D I
MADJEN TNI.

GELAR PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
BUNG KARNO DITJABUT

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Sidang Istimewa MPRS yang dilangsungkan sedjak tanggal 7 Maret sampai dengan 12 Maret 1967 kemarin siang telah mengeluarkan ketetapan MPRS no. XXXV/MPRS/1967 yang menjatakan bahwa gelar Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno dinjatakan ditjabut.

Hal ini dikeluarkan sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang yang dapat dilihat dari rantjangan Ketetapan MPRS yang isi lengkapnja sebagai berikut ;

RANTJANGAN.....





R A N T J A N G A N

K E T E T A P A N

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA R.I.
NO. XXXV/MPRS/1967.-

tentang

PENTJABUTAN KETETAPAN MPRS.

No. XVII/MPRS/1966.

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa gelar dan atau pengertian Pemimpin Besar Revolusi dipandang tidak perlu diatur dengan suatu Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
- b. bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 pasal 2 predikat Pemimpin Besar Revolusi jang diberikan kepada Bung Karno tidak mem bawa wewenang hukum dan karenanja dianggap sebagai gelar biasa.
- Mengingat : 1. Undang2 Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3).
2. Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966.
3. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.
- Mendengar : Musjawarah Sidang Istimewa Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tanggal 7 Maret sampai dengan 12 Maret 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PENTJABUTAN KETETAPAN MPRS NO. XVII/MPRS/1966.

Pasal 1

Mentjabut Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar revolusi.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 12 Maret 1967.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA R.I.

K e t u a ,

Dr. A. H. NASUTION.
DJENDERAL TNI.

Wakil Ketua,
OSA MALIKI.
Wakil Ketua,
M. SIREGAR.

Wakil Ketua,
H. M. SUBCHAN Z. E.
Wakil Ketua,
M A S H U D I
MAJ. DJEN. TNI.



U M U M :

- 17 -

12 - 3 - '67

GEMBONG GESTAPU/PKI SJAM DAN 5 ORANG
TEMANNJA DITJIDUK ABRI

Djakarta, 13 Maret(PAB).

Gembong Gestapu/PKI SJAM dengan 5 orang temannja telah ditangkap tanggal 9 Maret pagi jang lalu di-Djl.Simpang Tjimahi Bandung, oleh operasi kalong pimpinan Major SUROSO bekerdjasama dengan kesatuan Siliwangi. Demikian diterangkan oleh Panglima Daerah Militer V Major Djenderal AMIR MACHMUD Minggu siang di Istana Olah Raga Senajan. -

(R45/A-24/PAB/III/67).

-----oSo-----

KESATUAN2 AKSI NUSATENGGARA BARAT
BERADA DIIBUKOTA

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Perutusan Front Pantjasila, Front Pemuda dan Kesatuan2 Aksi Nusa Tenggara Barat pimpinan Mohammad Said kini berada diibu-kota dalam rangka menjampaikan pernjataan2 masjarakat Nusa Tenggara Barat kepada pemerintah Pusat dalam menjambut sidang istimewa MPRS. Untuk maksud tersebut perutusan telah menemui menteri dalam negeri Basuki Rachmat dan menteri penerangan B.M. Diah. -

(R45/A-24/PAB/III/67).

-----oSo-----

MERTUA PAK GANDHI MENINGGAL DUNIA

Djakarta, 13 Maret (PAB).-

Mertua Direktur Umum Staf Hankam/Pimpinan /Penanggung djawab PAB Brigdjen H. Sugandhi bernama Bapak Rd.Suprpto telah meninggal dunia pada hari Djum'at tanggal 10 Maret 1967 jl djam 22.00 malam di Magelang.

Atas wafatnja mertua Pak Gandhi, Rd.Suprpto almarhum, dengan ini segenap karyawan PAB menjatakan turut bela sungkawa. Semoga Tuhan menerima mending disisi-Nja. Inna lillabi wainna ilabi rodjiun.

(R040/PAB-03/III/67).-

----- S1 -----





PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13-3-1967

SIDANG ISTIMEWA MPRS BERACHIR DENGAN
KETETAPAN MENJABUT KEKUASAAN PIMPINAN NEGARA
SUKARNO.

+ Dan beberapa Ketetapan lain dalam Lembaga Negara.

Djakarta, 13 Maret (PAB).-

Sidang Musjawarah Pleno ke VII SI MPRS yang dilangsungkan Minggu kemarin jam 13.15, telah mengesahkan 4 buah Ketetapan dan satu Keputusan MPRS 1967, dengan aklamasi. Ketetapan2 yang telah disahkan itu ialah, Ketetapan2 MPRS No.33 tentang Pentjabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno No.34 tentang Penindjauan Kembali Ketetapan MPRS No.I/1960 mengenai Manipol sebagai Haluan Negara, No.35 Pentjabutan Ketetapan MPRS/66 No.XVII dan No.36 tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS/1966 No.XXVI. Sedangkan Keputusan yang telah diambil ialah No.37 tentang Pengukuhan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 No. 24/B/67 Diktum ke III, tentang Perpanjangkan waktu Kerja Panitia Ad Hoc B.

+ Sekitar pentjabutan kekuasaan

Dalam ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/67, tentang Pentjabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno, dalam pasal2nja antara lain dinjatkan bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat lagi memenuhi pertanggungjawaan djawab konstitusionil, dan telah tidak dapat mendjalankan haluan dan keputusan MPRS sebagaimana lajaknja kewadjaiban seorang Mandataris MPRS terhadap MPRS yang memberi mandat, yang diatur dalam UUD-45.

Oleh karenanja, didalam pasal berikutnja, dinjatkan dengan tegas melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan Pemilihan Umum dan sedjak berlakunja Ketetapan ini menarik kembali Mandat MPRS dari Presiden Sukarno serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam UUD-1945. Seterusnja menetapkan berlakunja Ketetapan MPRS No.XV/1966 dan mengangkat Djendral Subarto Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/1966 sebagai Pedjabat Presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnja Presiden oleh MPR hasil pemilu.

Sedangkan mengenai persoalan bakum selanjutnja, yang mengangkat diri Dr.Ir.Sukarno, ditetapkan menjerahkan pelaksanaannja kepada Pedjabat Presiden. Demikian antara lain pasal2 dalam Ketetapan diatas, dimana mulai berlaku surat tanggal 22Pebruari 1967.

Manipol.....



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

- 19 -

13 -3- ' 67

Manipol ditinjau kembali

Selanjutnya mengenai Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/67 tentang peninjauan kembali ketetapan MPRS No. I/60 menyatakan bahwa ketetapan MPRS No. I/MPRS/60 tentang Manipol sebagai Garis Besar Haluan Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang. Oleh karenanya, dalam pasal berikutnya ditentukan agar Pimpinan dan Badan Pekerja MPRS meninjau, meneliti dan mengganti ketetapan MPRS No. I/MPRS/60 sesuai dengan hasil? SU MPRS IV dan SI MPRS '67 untuk kemudian hasil? karya Pimpinan dan BP. MPRS itu dibawa ke sidang Umum MPRS untuk disjahkan.

Celar PBR ditjabut.

Seterusnya dalam ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/67, tentang penjabutan Ketetapan MPRS No. XVII/66, dinyatakan bahwa ketetapan MPRS No. XVII/66 tentang PBR sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini. Oleh karenanya, ditetapkan untuk menjabut ketetapan MPRS XVII/MPRS/66 tentang PBR. Demikian pula ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/67, dengan tegas menjabut ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/66, tentang penelitian adjaran? PBR Bung Karno. Hal itu menimbang bahwa karya? B.K. mempunyai kedudukan yang sama dengan karya? Pemimpin? Indonesia lainnya dalam tata kehidupan Demokrasi Pantjasila.

Ahirnya sebagai satu?nya keputusan yang disjahkan oleh SI MPRS ini, ialah keputusan MPRS No. XXXVII/MPRS/1967 tentang pengukuhan keputusan Pimpinan MPRS tgl. 6 Maret 1967, mengenai waktu berpundjung waktu kerja panitya ad hoc -B, dimana disebutkan bahwa waktu kerja panitya ad hoc B ini diperpanjang selama 6 bulan mulai tanggal ditetapkannya ketetapan tsb, yang mana ditetapkannya pada tgl. 12 sedang tentang jumlah anggotanya dapat ditambah dan disempurnakan.

Demikian ketetapan? dan Keputusan yang telah disjahkan oleh MPRS dalam Musjawarah Plenonja yang ke VII, tgl. 12 Maret kemarin siang di Istora Senayan Djakarta. Setelah selesai penzesjahan, maka sidang diteruskan utk mendengarkan pendapat? para anggota sebagai stemotivering tarakhir atas disjakkannya hasil? kerja Komisi A dan B SI MPRS 1967.

Sore itu, pembicara telah mengutarakan pendapatnya, dimana umumnya semua mengharapkan agar supaya dengan berhasilnya SI MPRS ini menelorkan ketetapan? dan keputusan?nya, hendaknya dapat mengachiri situasi konflik dalam negeri dan hendaknya bisa membawa rakyat kearah persatuan dan kesatuan demi lekas terdjaminnya kesedjahteraan rakyat seluruhnya.

Selanjutnya pada Minggu malamnya telah diadakan Penutupan SI, MPRS dimana setelah berakhir diadakan konferensi pers dengan pimpinan MPRS sampai djauh malam.

(R36/A-10/PAB/III/67).

-----SW-----



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13 - 3 - '67

"BAKUL DJAMU" DAN "WAJANG" KELUAR SEBAGAI
PEMENANG II DAN III DALAM PAMERAN LUKISAN
INTERNASIONAL

* Indonesia berhasil duduki
kedjuaraan lukisan.

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Dirdjen Kebudayaan PDK Indrosoegondo telah menje-
rahkan hadiah pada dua orang kader yang baru sadja me-
ngikuti perlombaan Internasional Painting Exhibition ..
di Lumania baru2 ini, yang diikuti dari 70 Negara peser-
ta untuk lukisan2 yang berusia 17 tahun kebawah, dimana
Indonesia telah berhasil menempati nomor 2 dan 3 sedang-
kan hadiah nomor satu sampai saat ini belum ada.

Diterangkan oleh Indrosoegondo bahwa hadiah yang
diberikan kepada para pemegang kedua dan ketiga itu ia-
lah berupa dua buah Alboom . Sedangkan lukisan2 yang
mendapat nomor "ibu bakul djamu" memenangkan hadiah no.2
(Sdr.Moenardi) dan "wajang" yang melukiskan dua raksasa
memenangkan hadiah no.3 (Sdr.Isnaini M.H.)

Pada kesempatan itu oleh wakil Kedutaan sek.Ke III
Prigorlanov, mengharapakan kepada para pemenang Indone-
sia, agar dalam usaha Exhibition yang diselenggarakan
di Lumania yang berstandradkan internasional itu akan
lebih mempererat persahabatan antara kedua Negara. Di-
tambahkan pula bahwa para siswa tersebut keduanya di-
suh dari Sanggar Bambu Djokjakarta. -

(R38/Sjd/PAB/III/67).

-----oSo-----

SUMBANGAN PAKAIAN DARI PELADJAR2 INDIA
UNTUK KORBAN BANDJIR.

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Hubungan Masyarakat PDK mengatakan kepada PAB hari
Sabtu bahwa para Peladjar "Gandhi Memorial School" te-
lah menjerahkan k.l. 900 potong pakaian bekas untuk
para korban bandjir. Penjerahan tsb dilakukan dengan se-
tjara simbolis oleh Wakil Duta Besar India P.Ratnam ke-
pada Menteri PDK Sarino bertempat di Aula Sekolah tsb.

Peristiwa ini disaksikan oleh kepala hubungan luar
negeri Soejono Kromodimoeljo dan Dir. Sek. V.Ram,
Perlu diterangkan bahwa sedjumlah pakaian tsb bultan da-
ri masyarakat India yang dikirim ke Indonesia, melain-
kan hanja dari anak2 sekolah Gandhi Memorial School
Indonesia.-

PERPUSTAK (R38/Sjd/PAB/III/67).

REPUBLIK INDONESIA

-----oSo-----



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

U M U M :

13-3-1967.

Pangdam VI/Siliwangi Majdjen
Dharsono:

TAK ADA JANG MERASA MENANG ATAU KALAH TAPI SE-
LURUH RAKJATLAH JANG MERASA MENANG

- + Babak terakhir lenjapnja kekuasaan Sukarno.
- + Atjara perpisahan antara Presiden Sukarno dengan MPRS.

Djakarta, 13 Maret (PAB).-

Sidang Istimewa MPRS kemarin siang telah berhasil setjara aklamasi mengesjabkan 4 buah Ketetapan2 dan satu Keputusan, dimana kesemuanja itu adalah merupakan hasil djerib pajah segenap para wakil2 rakjat dari berbagai golongan jang telah memeras pikiran setjara maraton siang dan malam.

Selesai pengesjahan Ketetapan2 dan Keputusan tsb, maka atjara dilandjutkan dengan mendjengarkan pendapat2 dari berbagai golongan terhadap hasil2 jang telah ditjapai oleh SI MPRS itu. Dalam kesempatan itu, telah berbitjara 15 orang, termasuk diantaranya Majdjen Dharsono dari Djawa Barat.

Majdjen Dharsono selaku pembijara pertama siang itu dalam stemotiveringinja antara lain menegaskan bahwa dalam perdjjuangan itu bukanlah mentjari kemenangan, tetapi kita harus membawa kemenangan Pantjasila untuk r akiat seluruhnja. Dalam hal ini bukanlah kemenangan golongan atau pribadi jang ditjari tetapi harus merupakan kemenangan demi misi Orde Baru.

+ Esa hilang dua terbilang.-

Didalam mengemukakan tekad perdjjuangannja, Majdjen Dharsono, jang djuga mendjabat sebagai Pangdam VI/Siliwangi, telah menegaskan bahwa sembojan perdjjuangannja selalu berkumandang: "Esa Hilang, dua Terbilang". Dalam melakukan tekad perdjjuangannja itu, menurut Dharsono, lebih baik kita tidak kembali daripada tidak membawa hasil2 untuk kepentingan seluruh rakjat.

Sebagai barisan Orba jang rasional, pembijara dapat menerima pendjelasan Djendral Soeharto. Oleh karenanja, ia dapat mengerti dan menerima pendjelasan2 Djendral Soeharto itu. Achirnja ditegaskan bahwa Corps Siliwangi tidak berkultus individu, tetapi tetap taat melaksanakan kewadajiban2nja demi suksesnja perdjjuangan.

+ Berpanit2an dengan Sukarno.

Pembijara lainnja, ialah Harsono Tjokroaminoto dari PSII, jang antara lain mengemukakan bahwa saat2 kemarin siang itu, pada hakekatnja MPRS sedang berpanit2an dengan Presiden Sukarno. Demikian djuga dengan gelar2 PBRnja Bung Karno.

Menjingga.....



U M U M :

1303-1967

Menjijnggung mengenai soal Pemimpin, ditandas-kan bahwa kita Indonesia, tidaklah kalah dengan luar negeri jang mempunjai Pemimpin2 Politik dari Tentara. Di Indonesiapun, tidak kurang manusia2 jang berbadju bidjai sanggup dan mampu bukan sadja sebagai Soldat, te tapi djuga sebagai "state-man" jang baik.

Seterusnja pemitjara ini mengharapjan agar supaja, Pak Harto setelah dilantik, bisa menegakkan kembali politik Luar Negeri Indonesia dan menegakkan kembali kepertjajaan Luar Negeri kepada Indonesia. Achirnja Haesono Tjokroaminoto menjatakan bahwa sjarat mutlak untuk tjegah adanja kesengsaraan rakjat, ialah dengan mengachirinja dualisme. Mudah2an kegagalan pola pikiran seperti Bung Karno itu tidak terulang kembali.

Demikian a.l. pendapat2 dalam stemotivering terachir setelah pengesjaban hasil2 SI MPRS, dimana umumnja semua pemitjara mengharapjan agar supaja dengan hasil2 MPRS ini hendaknja mengachiri situasi konflik, dualisme-pun diachiri, serta bisa mengembalikan kepertjajaan luar negeri.

Dan jang penting, bahwa dalam hal ini tidak ada satu golonganpun jang harus merasa kalah atau menang. Tetapi hasil2 MPRS ini tidak lain dripada merupakan kemenangan selurah rakjat Indonesia jang tjinta kepada Pantjasila.

(R36/A-10/PAB/III/67).-

----- SI -----

BAMBANG UTOJO DENGAN LETDJEN M.SARBINI
SUDAH CLEAR

Djakarta, 13 Maret (PAB).-

Sehubungan dengan adanja surat Bung Tomo jang dimuat disementara barian2 di Ibukota jang menjangkut tentang pidato Bambang Utojo dalam Pemandangan umumnja dalam SI MPRS, Major Sugiarto selaku Ass Menved, menjatakan bahwa soal tsb sudah clear, setelah diadakan clearing-approach antara Bambang Utojo dengan Letdjen M Sarbini selaku Ketua Umum LVRI.

Dan dalam clearing approach tsb telah ditjapai pengertian bersama dan dengan demikian maka persoalan tsb sudah tidak ada lagi. Demikian Major Soegiarto anggota MPRS selaku Ass Menved, dalam keterangannya kepada pers Minggu siang.

(R36/A-10/PAB/III/67).-

----- SI -----



U M U M :

13 - 3 - '67

Segenap Corps Veteran Indonesia:

DJANGAN ADA COLONGAN JANG MAU KORUPSI ATAS
PENGERTIAN2 DARI KEPUTUSAN2 MPRS

* Selesuinja SI MPRS hendak
nja bisa mengachiri dualisme.

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Menanggapi hasil2 jang telah ditjapai oleh SI MPRS, sesuai dengan tekad bersama, maka kita semua harus berani mengamankan dan mengamalkannya untuk mengachiri situasi konflik dan perpetjahan, dengan bekal djiwa dan mental orde baru kearah terdjaminnja keamanan, ketertiban dan kesedjahteraan rakjat seluruhnja. Demikian Major Sugiarto, anggota MPRS/DPRGR dari kelompok Veteran, jang djugamerangkap sebagai Ass Menved dalam keterangan persnja Minggu siang kemarin.

Ditegaskan selandjutnja bahwa Corps Veteran jang sudah tjukup berpengalaman selama ini memperingatkan, djangan hendaknya ada orang atau golongan jang mau korupsi atas pengertian2 dari semua Keputusan MPRS untuk kepentingan golongan atau sendiri. Adalah mendjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan pengertian jang wajar sesuai dengan isi dan djiwa Keputusan MPRS kepada masyarakat umum untuk membentuk satu pengertian, satu kesadaran dan satu arah sasaran tekad berdjungan.-

Djangan diperuntjing. -

Major Sugiarto djuga mengharapkan agar supaya seandainya ada perbedaan2 pendapat, maka hendaknya djanganlah diperuntjing dalam perpetjahan apapun, melainkan harus diselesaikan dengan konsultasi antara golongan setjara silaturachmi jang baik. Achirnja, dinjatakan bahwa Corps Veteran akan tetap taat dan mengamankan serta mengamalkan segala keputusan2 MPRS dan pendapat dengan apa jang telah di kemukakan baik oleh Ketua MPRS maupun Pd Presiden - Djenderal Suharto pada malam penutupan SI MPRS tadi malam, dengan harapan2 lain jaitu hendaknya dualisme pemerintahan segera hapus dengan berhasilnja SI MPRS menelorkan keputusan2nja.-

(R36/A-10/PAB/III/67).

-----oSo-----

S E L E S A I



EKU INBANG :

13 -3- ' 67

BANTUAN EKONOMI AUSTRALIA PADA INDONESIA
SEDANG DIBITJARKAN DI MELBOURNE

Djakarta, 13 Maret (PAB)

Bantuan sipil Australia yang pertama sedjak lebih dari 2 tahun kepada Indonesia kini sedang direntjanakan oleh kampanye Pembebasan kelaparan di Melbourne kemarin malam. Ketua rentjanakampanje tersebut Prof. J.P.Nahmilon mengatakan bahwa rentjana tadi akan diusatkan di Djateng.

Bantuan Australia untuk Indonesia dihentikan ketika Indonesia keluar dari PBB dalam bulan Januari 1965.

Kemudian dalam bulan September 1966 Indonesia menggabungkan diri lagi pada PBB Nahmilon mengatakan bahwa dalam bulan September nanti akan dilantjarkan kampanye sokongan untuk membantu membiyai rentjana pertanian bagi penduduk desa di Indonesia. Kampanje tersebut akan dapat mengumpulkan uang sebanyak 260.000 dollar. Prof. Nahmilon menambahkan bahwa rentjana produksi pangan terutama tanaman pangan terhitung djenis katjang yang mengandung paling banjak protein.

(R050/Re1/PAB/III/67)

----- (w) -----

S E L E S A I.





13 -3- ' 67

KEBUDAJAAN :

SARINAH BERGERAK DIBIDANG SHOW

⊕ "Lapangan baru" bagi para artis.

Djakarta, 13 Maret (PAB)

P.T. Ria Sari usaha bersama dengan P.T. Departement Store Indonesia "Sarinah" yang bergerak dibidang Show & Restaurant Management telah membuka dan memulai usahanya dalam bidang Impresariat dan Artists Agencies yang akan menjelenggarakan pertunjukan2 Show, film2, pameran2, pertunjukan2 kesonian dan sebagainya, baik yang akan dilaksanakan oleh Ria Sari sendiri ataupun menjelenggarakan Show Management pertunjukan2 sebagai kontraktor.

Dalam bidang Artists Agencies Ria Sari akan bergerak sebagai Agent dari para Artists baik yang kelak mengadakan kontrak dengan Ria Sari Show Management maupun Artists yang tidak terikat dengan Ria Sari Show Management.

Sebagai diketahui pimpinan dari P.T. Ria Sari adalah H.A.M. Dasaad, sebagai Direktur Utama dan H. Usnar Ismail sebagai Direktur Pelaksana.

(R049/Rel/PAB/III/67)

----(w)----

ULANG TAHUN HARIAN "IZVESTIA" ke -50

Djakarta, 13 Maret (PAB)

"Izvestia", sebuah harian yang unggul dalam sirkulasi di dunia merayakan ulang tahunnya yang ke 50 pada tgl. 13 Maret. Sebanjak 8.700.000 orang berlangganan surat kabar ini ("Pionerskaya Pravda", surat kabar anak2 yang populer, mempunyai sirkulasi yang lebih besar, hampir 10 djuta).

"Izvestia" adalah terompet Sovjet dari Wakil2 rakyat pekerja U.R.S.S. Surat kabar yang pertama dari badan kekuasaan negara yang baru ini, Sovjet2, "Izvestia" lahir pada hari otokrasi digulingkan, pada tgl 28 Febr. 1917.

Honor permulaannya memuat sebuah seruan, "kepada penduduk Petrograd dan Rusia atas nama Sovjet wakil2 buruh Petrograd, yang dibentuk pada hari sebelum Revolusi Februari. Demikian Tass.

(R049/Rel/PAB/III/67)

----(w)----



KEBUDAJAAN :

13 -3- ' 67

MUSEUM DJAKARTA. ULAI LAGI KEGIATANNJA
DIBIDANG PERWAKILAN

Djakarta, 13 Maret (PAB)

Hari Minggu tgl. 12 Maret 1967 ,bertempat diruangan gamelan Museum Pusat, Merdeka Barat 12, Djakarta, telah diselenggarakan pertunjukkan gamelan Seni Sunda Rukun Margi, dibawah pimpinan Djaenuddin dengan Djuru sinden2nja :Nji.S.K. Ningsih dan Nji.Rosita dari Kramatdjati.

Pertunjukkan2 seperti itu selama ini terhenti dan mudah2an akan diselenggarakan lagi tiap hari Minggu .Djuga kepada perkumpulan2 lainnja di Ibukota Museum Pusat akan memberi kesempatan untuk mengadakan debutnja masing2.

(R050/Rel/PAB/III/67)

----(w)----

S E L E S A I





LUAR NEGERI :

13 -3- 1967

NEGARA2 JANG MENDAPAT MEDALI EMAS
DI PEKAN RAYA LEIPZIG

Djakarta, 13 Maret (PAB)

Sedjumlah 151 medali emas disediakan oleh penyelenggara? PR Musin Semi Leipzig jang kini berlangsung hari Djum'at untuk hasil? bermutu luar biasa. Jang pertama telah dihadiahkan dalam 1963. Dalam PR kini pabrik kendaraan motor Sovjet memenangkan hadiah rebutan ini untuk ke 1000 kalinja untuk truck sampah lintas darat dengan kapasitas 40 ton. Raksasa kendaraan bermotor ini jang dipamerkan ditengah tehnik merupakan salah satu atraksi dalam PR itu.

Barang? pameran lainnja jang menang medali itu ialah mikroskop buatan Carl Zeiss Jena, pabrik optik yang terkenal didunia, tilpun radio frekuensi sangat tinggi dari perusahaan Denmark, alat mesin dari Renault, Perantjis, alat penderek ajunan Inggris traktor dengan ban berbentuk ulat dari AS, kemarin presisi buatan Linhof Jerman Barat, "Dry Fine Sherry" dari KEO Lt d, Cyprus, & permadani buatan tangan dengan pola? Farao dari RPA.

(R050/R01/PAB/III/67)

----(w)----

1553 "WARTAWAN IKUT DALAM PUSAT PERS
PEKAN RAYA LEIPZIG

Djakarta, 13 Maret (PAB)

Sampai hari kelima dari Pekanraya Leipzig jang kini berlangsung, tertjutat 341 000 pengundjung termasuk 51700 dari luar negeri, Jerman Barat dan Berlin Barat. 1553 Wartawan dari 56 negara diutuskan ikut serta dalam pusat pers Pekanraya itu.

Negara? Sosialis, terutama Sovjet, diharapkan untuk menandatangani persetujuan? djangka panjang lainnja, terutama dibidang pabrik industri lengkap dan mesin berat.

Perusahaan? Eropa barat terutama mentjari bentuk? kerdja sama jang baru, sedangkan 30 negara baru berkembang jang diwakili dlm PR itu lebih banyak menggunakan sebagai pusat penerangan dan hubungan.

(R050/R01/PAB/III/67)

----(w)----





PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LUAR NEGERI :

13 -3- 1967

BURUH BEKERDJA 5 HARI SEMINGGU DI SOVJET

Djakarta, 13 Maret (PAB)

Comite Central PKUS dan Dewan Menteri URSS mengum-
bil keputusan dimana dimaksudkan perkembangan dan per-
baikan selanjutnya pelajanan makanan untuk umum. Peran-
an pelajanan makanan untuk umum meningkat terutama da-
lam keadaan peralihan buruh dan pegawai kepekan kerdja
5 hari dengan 2 hari istirahat.

Pelajanan makanan untuk umum jang dia tur
dengan baik akan memberi kesempatan kepada kaum bekerdja
untuk menieleenggarakan dengan lebih baik lagi waktu
luangnja atau pekerdjaannja, maupun untuk menjurahkan
lebih banjak perhatian untuk mengasuh anak2 serta akan
melepaskan kaum wanita dalam praktek dari kerdja jang
merepotkan untuk memasak makanan dalam keadaan rumah
tangganja dan akan mempertinggi peranan mereka dalam
kehidupan masjarakat.

Demikian APN.

(R049/PAB/Rel/III/67)

---(*)---

MINJAK ARAB UNTUK ORANG2 ARAB

Djakarta, 13 Maret (PAB)

Di Bagdad baru2 ini menurut APN dimulai peker-
djaan Kongres ke 6 Negeri2 Arab mengenai masalah2 mi-
njak. Para penindjau politik dinegeri itu, dengan tidak
menutup matanja terhadap kesulitan2 jang dapat dihadapi
oleh forum Minjak Arab itu, sependapat, bahwa Kongres
itu akan memperlihatkan ketabahan mutlak dari kebanja-
kan negeri2 Arab untuk mewujudkan dalam kenyataan lam-
bangnja : "Minjak bumi Arab untuk orang2 Arab!"

(R049/Rel/PAB/III/67)

----(*)----





13 - 3 - '67

REFERANDUM PERANTJIS TIDAK DJUDJUR
KATA SOMALI.

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Republik Somalia telah mendesak kepada PBB supaya mengirim utasannya ke Tanah Somali Perantjis pada tanggal 19 Maret berhubung akan dilangsungkan referendum untuk mengetahui apakah daerah itu akan menjadi negara berdaulat atau akan tetap merupakan daerah Perantjis.

Republik Somalia berpendapat bahwa bentuk referendum itu tidak djudjur dan tidak benar.

Ketjuali itu kabarnya bahwa orang yang menentang pemerintah Perantjis akhir2 ini didjeblokkan dalam tabuhan sehingga mereka tidak dapat mengadakan propaganda.

Tabun yang lampau sidang umum PBB telah meminta apakah boleh dikirimkan sedjumlah penindjau kedaerah itu, akan tetapi Perantjis tidak memberikan djawabannya.

(R45/A-24/PAB/III/67).-

-----oSo-----

DJAW. RAHASIA AS PUNJA HUBUNGAN
DENGAN ORG. MAHASISWA BELANDA?

Djakarta, 13 Maret (PAB)*

Pemerintah Belanda mengumumkan kepada Parlemen bahwa tidak adatan2 yang menundjukkan bahwa djawatan rahasia Amerika mempanjai hubungan dengan organisasi mahasiswa Belanda.

Akan tetapi apabila penjelidikan yang diperintahkan oleh Presiden Johnson akan menghasilkan keterangan2 baru, maka pemerintah Belanda akan mentjurahkan perhatiannya lagi pada soal ini.-

(R45/A-24/PAB/III/67).

-----oSo-----

JULIANA TUNDJUK BINHOVEL MEMBENTUK
KABINET BELANDA

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Ratu Belanda Juliana telah meminta kepada Mr. Baron van Bihovel berumur 46 tahun supaya membentuk kabinet baru Belanda.

Mr. Bihovel dari golongan Partai Protestan adalah wakil PM Kabinet interim yang berhenti setelah pemilihan umum tgl. 15 Pebruari.

Tentang susunan kabinet baru Belanda sudah ditjapai persetujuan dan anggota2nya akan terdiri dari orang2 Katholik, Protestan dan Liberal.

Sedangkan pihak Sosialis akan merupakan partai oposisi yang terpenting.-

(R45/A-24/PAB/III/67).

-----oSo-----



LUAR NEGERI :

13 - 3 - '67.-

KEMBAR 8 DI MEXIKO

Djakarta, 13 Maret (P.A.B).--

Seorang ibu jang masih muda di Mexiko city hari D jumi'at telah melahirkan anak kembar, 8, jaitu 4 anak lelaki dan 4 anak wanita.

Empat diantaranya meninggal dunia tidak lama setelah lahir dan empat lainnya berada dalam keadaan jang mengawatirkan.

Dikabarkan bahwa 8 bayi itu dilahirkan 2 bulan lebih tjepat dari waktunya.

(R.045/A-24/PAB/III/'67)

---(atn)---

INGGERIS, SELANDIA BARU, DAN AUSTRALIA MAU

PERTAHANAN ASIA TENGGARA DARI ANTIJAM

AN R.R.T

Djakarta, 13 Maret (P.A.B).--

Bekas Kepala Staf Pertahanan Inggris, Laksamana Medya Sir Richard Hall mengatakan bahwa Inggris, Selandia Baru dan Australia tjukup untuk mempertahankan Asia Tenggara terhadap Tjina Komunis.

Barbitjara dalam suatu konferensi Pers di Welington hari D jumi'at, Sir Richard Hall mengatakan keraguan apakah daerah2 jang bebas nuklir memberikan faedah.

(R.045/A-24/PAB/III/'67)

---(atn)---

PELARIAN TIBET PAWAI DI NEW DELHI

MEMENTANG TJINA

Djakarta, 13 Maret (P.A.B).--

Lebih dari 1000 pelariandari Tibet hari D jumi'at telah melantjarkan suatu pawai jang teratur di New Delhi menuntut diakhirinja pendjadjahan Tjina Komunis di tanah air mereka.

Para demonstran itu membawa poster2 jang bertulis stop pembunuhan besar2ahdi Tibet dan masa lah Tibet diserahkan kepada orang Tibet.

Pawai itu dilakukan bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-8 pemberontakan jang tidak berhasil di Tibet dalam menentang Tjina Komunis.

(R.045/A-24/PAB/III/'67)

---(atn)---



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HUKUMAN PENDJARA TERHADAP PENDJAHAT
PERANG TANPA BATAS WAKTU.

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Amerika Serikat telah menjatakan dukungan penuh terhadap persetujuan yang disponsori oleh PBB yang akan menghapuskan pembatasan2 waktu terhadap hukuman pendjara yang didjatuhkan kepada orang2 yang melakukan kedjabatan2 perang dan kedjahatan2 terhadap kemanusiaan.

Rentjana persetujuan itu diserahkan oleh Sekdjen U Thant kepada komisi PBB mengenai hak2 kemanusiaan.

Utusan Amerika Serikat menjatakan dalam suatu pertemuan komisi itu di Djenewa bahwa PBB menghendaki persetujuan sematjam itu, karena kedjahatan2 tsb meliputi hal2/melampaui batas sehingga seharusnya djangan diadakan batas waktu untuk memberikan hukuman.- /yang

(R45/A-24/PAB/III/67).

-----oSo-----

BELANDA KURANGI LIN2 PELAJARANNJA

Djakarta, 13 Maret(PAB).

Perusahaan pelajaran Royal Interocean Line milik Belanda telah memutuskan untuk menghentikan dinas pelajaran kapal2 penumpangja mulai tahun depan antara Amerika Selatan, Afrika Selatan dan Negara2 Asia Timur.

Tindakan ini dilakukan mengingat banjak kapal2 penumpang dan pengangkut barang2 Belanda sudah dalam keadaan tua.

Oleh pemerintah Belanda kini sedang dipesan kapal2 baru dari Djepang dengan ukuran rata2 13.000 ton tiap kapal. -

(R45/A-24/PAB/III/67).-

-----oSo-----

SIDANG ISTIMEWA PBB 21 APRIL JAD.

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Sekdjen PBB U Thant mengumumkan bahwa sidang istimewa ke-5 Madjelis Umum PBB akan dimulai pada tanggal 21 April nanti.

Sidang istimewa itu yang akan berlangsung selama 3 Minggu akan mempertimbangkan pembentukan suatu dewan pemerintahan PBB untuk Afrika Barat Daya.

Sidang itu djuga akan menindjau seluruh persoalan mengenai kegiatan2 pemeliharaan perdamaian PBB.-

(R45/A-24/PAB/III/67).-

-----oSo-----



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LUAR NEGERI :

13 - 3 - '67

DJEPANG MENJELIDIKI KEMUNGKINAN MENGA-
DAKAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DG MONGOLIA.

Djakarta, 13 Maret(PAB).

Kemlu Djepang telah membayangkan bahwa Djepang akan menjelidiki kemungkinan untuk mengadakan ikatan2 diplomatik dengan Mongolia ketika pedjabat2 mengundjungi negara ini bulan depan. Bayangan ini telah diberikan oleh djurubitjara Kemlu Tuan Miseko pada sebuah konferensi pers pada hari Kamis.

Akan tetapi, ditambahkan, hal ini tidak berarti bahwa Djepang bersedia untuk segera mengadakan hubungan2 normal dengan Mongolia. Pedjabat2 Mongolia itu akan mengundjungi Djepang dalam bulan April untuk menghadiri sebuah pertemuan umum dari komisi ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Djauh. (Cafe).

Pemerintah Djepang mengambil pandangan bahwa Djepang telah memberikan pengakuan setjara de facto kepada Mongolia ketika negara ini mendukung pemasukan Mongolia kedalam PBB di tahun 1961. Tetapi hubungan diplomatik antara Djepang dan Mongolia belum diadakan oleh karena Tiongkok Nasionalis menentang kepada pengakuan Mongolia dan sikap Mongolia tidak djelas terhadap masalah ganti kerugian perang kepada Djepang.

Mengenai masalah ini Wakil Menlu Sinoda telah mengatakan pada hari Kamis bahwa Djepang akan harus mengurus masalah itu setjara ber-bati2 dengan mengambil pertimbangan keinginan dari negara2 sahabatnja seperti Tiongkok Nasionalis. -

(R50/Rel/PAB/III/67).

-----oSo-----

NJ. INDERA GANDHI DAN MARADZI MEREbutKAN KURSI P.M.

Djakarta, 13 Maret(PAB).

P.M. India, Nj. Indera Gandhi dan bekas Menteri Keuangan Maradzji akan berdjung untuk merebut jabatan P.M. selama masa pemerintahan jad apada sidang party kongres hari Minggu ini akan ditetapkan siapa jang akan mendjadi pemimpin baru party pemerintah jang serentak akan mendjadi P.M. baru djuga. Pada saat terakhir Maradzji mengatakan bahwa ia tidak mau memegang jabatan Wakil PM dibawah Nj. Gandhi. Dikatakannja, bahwa Party kongres harus mendjalkan tuntutan jang djelas.-

(R50/Rel./PAB/III/67).-

-----oSo-----



BANTUAN A.S UNTUK PAKISTAN

Djakarta, 13 Maret (PAB).-

Dari AS telah ditanda tangani di Islamabad kemarin, Bantuan besar pendjaman yang disjahkan oleh badan pemberi bantuan sumbangan Internasional A.S 2 minggu yang lalu akan dipergunakan untuk memperluas perindustrian dan usaha2 mentjukupi bahan makanan dalam tempo sesingkat mungkin.

Dubes A.S menanda tangani perdjandjian atas negaranja nengingat/pernjataan Presiden Johnson dalam kongres baru2 ini mengenai kemadjuan perkembangan ekonomi Pakistan yang pesat.

/ kan

(R.050/Rel/PAB/III/67)

---(atm)---

PRESIDEN JOHNSON AKAN KUNDJUNGI DAERAH2PASIFIC

Djakarta, 13 Maret (PAB)-

Presiden Johnson telah mengumumkan bahwa ia berharap untuk melaksanakannya kunjungan kedaerah Pasific menjelang akhir bulan ini akan mengadakan pembitjaraan2 dengan komandan Amerika di Vietsel dan Dubes AS itu Henry berbitjara kepada para wartawan kemarin malam.

Presiden AS itu tidak mengatakan dimana pembitjaraan2 itu akan diadakan. Ia ingin sekali mengusahakan perdamaian setcepat mungkin Presiden Johnson mengatakan politiknya berdasarkan pada keterangan2 dan petunjuk2 yang diterimakan nja dari diplomat2 Amerika seluruh dunia dan penasihat2 militer dan keterangan2 yang diberikan kepadanya dan melakukan segala sesuatu yang dapat diperbuatnja itu untuk negeri itu tanpa memandang militer dan politik.

Untuk melakukan usaha2nja itu ia bersedia menggunakan persetujuan2 Djenewa P.B.B dan sebuah konferensi seluruh negara2 Asia Afrika untuk mentjapai perdamaian perang Vietnam. AS bersedia pergi kemedja perundingan setiap waktu AS bersedia mengadakan pembitjaraan2 tanpa sjarat atau pembitjaraan mengenai sjarat2. Tetapi Presiden Johnson mendjelaskan bahwa AS tidak berhenti ditengah djalan dalam peperangan itu selagi pihak komunis mengadakan pembunuhan terhadap tentara Amerika.

(R.050/Rel/PAB/III/'67)

---(atm)---





LUAR NEGERI :

13 - 3 - '67

SASTRA NEGERI? ASIA DAN AFRIKA
DI URSS

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Sebuah kumpulan tjerita karja pengarang Afrika Selatan Richard Reeve telah diterbitkan disini dalam rangkaian jang luas dari karja2 pengarang2 Asia dan Afrika.

Madjalah "Literaturnaya Gazeta" hari ini memuat sebuah tinjauan mengenai buku ini, dan serangkaian karangan2 mengenai pengarang2 Asia dan Afrika.

Karja2 dari pengarang2 di 36 negeri Afrika dan Asia telah diterbitkan di Uni Sovjet tahun jang lalu sebanyak lima djuta buku.

Kira2 tigaribu djudul buku karangan pengarang2 Asia dan Afrika telah diterdjemahkan kedalam bahasa2 rakjat URSS. Demikian TASS.-

(R37/Rel/PAB/III/67).

-----oSo-----

BULGARIA DALAM PEKAN RAJA DAN
PAMERAN2 INTERNASIONAL TH.1967

Djakarta, 13 Maret (PAB).

Dalam pekan2 raja perdagangan dan pameran2 industri internasional pedagang2 akan mempunjai kesempatan jang baik untuk menemui wakil2 perusahaan export Bulgaria untuk lebih mengenal kemudjuan Bulgaria. Tahun ini Bulgaria akan ikut dalam 15 pekan raja internasional :diLeipzig (baik dimusim semi maupun rontok) di Tripoli, Budapest, Prozman (Polandia), Brno, Saloniki (Junani), Izmir dan agreb.

Pameran2 akan diselenggarakan di Karatji, Teheran dan New Delhi. Disamping itu sedjumlah perusahaan import-export Bulgaria akan mengambil bagian dalam tjabang2 khusus pameran internasional. -

(R49/Rel/PAB/III/67).

-----oSo-----

S E L E S A I

